



**PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
TELEMEDICINE DALAM PERSPEKTIF  
KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**HANDOKO NUGROHO Y**

**2110622026**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
2023**



**PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
TELEMEDICINE DALAM PERSPEKTIF  
KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Handoko Nugroho Y

NIM : 2110622026

Tanggal : 20 Juli 2023

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Handoko Nugroho Y

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handoko Nugroho Y

NIM : 2110622026

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Hukum Telemedicine Dalam Perspektif Kepastian Hukum** Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

Yang Menyatakan



Handoko Nugroho Y



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondoklabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904  
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

**PENGESAHAN**

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Handoko Nugroho Y  
NRP : 2110622026  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : Pengaturan dan Pertanggungjawaban Hukum Telemedicine  
dalam Perspektif Kepastian Hukum

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.  
Ketua Penguji

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,  
S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes  
Penguji / Pembimbing I

Dr. dr. Abdul Kolib, M.H.  
Penguji / Pembimbing II

Dr. Suherman, S.H., LL.M.  
Dekan

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,  
S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes  
Koordinator Program Studi Magister  
Hukum

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : Kamis, 20 Juli 2023

# **PENGATURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TELEMEDICINE DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

**HANDOKO NUGROHO Y**

## **ABSTRAK**

Banyak negara yang merespon positif dan melegalkan penyelenggaraan telemedicine di negara mereka. Hal ini karena telemedicine memberikan keuntungan dan merupakan solusi dari pelayanan kesehatan yang terpisahkan oleh jarak. Belum adanya peraturan hukum tentang pelayanan kesehatan telemedicine, kondisi ini dapat menjadi sumber sengketa hukum, terlebih apabila dibarengi dengan kurangnya pengaturan dan kepastian hukum, maka hukum akan semakin sulit ditegakkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative.

Masalah hukum yang mungkin timbul meliputi perizinan, privasi pasien dan kerahasiaan catatan medis elektronik, kebijakan dan prosedur klinis. Sebagian besar aplikasi online untuk layanan kesehatan dibuat oleh profesional non-medis. Pemerintah bersama penyedia layanan dan masyarakat perlu untuk menetapkan standar nasional dan pedoman penggunaan telemedicine untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab, aman, berkualitas tinggi, adil dan tidak diskriminatif.

Telemedicine telah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan praktik kedokteran yang terbebas dari batasan jarak, namun hendaknya tidak diarahkan untuk menggantikan interaksi tatap muka dokter dan pasien. Sampai saat ini, belum ada pengaturan rinci tentang pelayanan kesehatan online baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam ketentuan etika profesi kedokteran. Sudah saatnya regulasi layanan telemedicine dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan memberikan kepastian hukum baik bagi praktisi kesehatan maupun pengguna layanan kesehatan.

Dikarenakan belum terdapat aturan hukum kesehatan secara khusus yang mengatur pemberian layanan telemedicine, maka pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana maupun administrasi.

**Kata Kunci : Telemedicine, Kepastian Hukum, Pengaturan dan Pertanggung Jawaban Hukum**

# **REGULATION AND LEGAL ACCOUNTABILITY OF TELEMEDICINE IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY**

**HANDOKO NUGROHO Y**

## **ABSTRACT**

Many countries have responded positively and legalized telemedicine in their countries. This is because telemedicine provides benefits and is a solution for health services that are separated by distance. There is no legal regulation regarding telemedicine health services, this condition can be a source of legal disputes, especially when accompanied by a lack of regulation and legal certainty, the law will be increasingly difficult to enforce. This study uses a normative legal research approach.

Legal issues that may arise include licensing, patient privacy and confidentiality of electronic medical records, clinical policies and procedures. Most online applications for healthcare are made by non-medical professionals. The government together with service providers and the public need to establish national standards and guidelines for the use of telemedicine to provide responsible, safe, high quality, fair and non-discriminatory health services.

Telemedicine has provided an opportunity to carry out medical practices that are free from distance restrictions, but should not be directed to replace face-to-face interactions between doctors and patients. Until now, there has been no detailed regulation regarding online health services, both in laws and regulations and in the provisions of medical professional ethics. It is time for regulations on telemedicine services to be included in national laws and regulations to meet the needs of technological developments and provide legal certainty for both health practitioners and users of health services.

Because there are no health law rules that specifically regulate the provision of telemedicine services, parties who commit violations can be held accountable both civilly, criminally and administratively.

**Keywords : Telemedicine, Legal Certainty, Regulation and Accountability Law**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Pengaturan dan Pertanggungjawaban Hukum Telemedicine dalam Perspektif Kepastian Hukum”**.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Suherman, S.H, LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Dr. dr. Abdul Kolib, M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberi dukungan, bimbingan dan arahan.
5. Istri tercinta dr Sativani Hasanah Maolana, Arzt Deva Avicenna, Calysta Quinn Megumi, dan Errando Kei Hideaki anak-anak tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 20 Juli 2023



**Handoko Nugroho Y**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	II
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	III
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	IV
<b>ABSTRAK</b> .....	V
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VI
<b>DAFTAR ISI</b> .....	VII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	21
A. Negara Hukum.....	21
B. Tanggungjawab Hukum.....	28
C. Telemedicine.....	41
D. Teori Kepastian Hukum.....	45
E. Perlindungan Hukum.....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	64
A. Pendekatan Penelitian.....	64
B. Spesifikasi Penelitian.....	65
C. Jenis Dan Sumber Data.....	65
D. Analisis Data.....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	68
A. Pengaturan Telemedicine Di Indonesia.....	68
B. Pertanggungjawaban Hukum Telemedicine Di Indonesia.....	119
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	154
A. Kesimpulan.....	154
B. Saran.....	158
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	165
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	